



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, Telp. 021-7989925, Fax 021-7974488
www.kemendes.go.id

Nomor : **S-045** /KDPDTT/PANSEL/09/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

29 September 2017

Kepada Yth.

1. **Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama LPNK**
2. **Sekretaris Daerah Provinsi di Indonesia**

di-

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan diselenggarakan Seleksi Terbuka yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana pengumuman terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk kiranya dapat menginformasikan pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud, kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Saudara. Informasi lengkap tentang ketentuan, persyaratan, dan tahapan Seleksi Terbuka dapat dilihat di www.kemendes.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia Seleksi,

Anwar Sanusi

Tembusan Yth.:

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Akuntabel – Profesional – Integritas – Kebersamaan



Lampiran I : Daftar Kementerian/Lembaga
Negara
Nomor : 5-045 /KDPDTT/PANSEL/09/2017
Tanggal : 29 September 2017

A. Sekretariat Lembaga Negara

1. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung;
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

B. Sekretariat Kementerian dan Setingkat Kementerian

1. Sekretariat Kabinet;
2. Kementerian Sekretariat Negara;
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Agama;
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kementerian Keuangan;
13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Kementerian Kesehatan;
16. Kementerian Sosial;
17. Kementerian Ketenagakerjaan;
18. Kementerian Perindustrian;
19. Kementerian Perdagangan;
20. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
21. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Kementerian Perhubungan;
23. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
24. Kementerian Pertanian;
25. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
32. Kementerian Pariwisata;
33. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga;

C. Sekretariat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

1. Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Badan Ekonomi Kreatif;
3. Badan Informasi Geospasial;
4. Badan Intelijen Negara;
5. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
6. Badan Kepegawaian Negara;
7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Badan Narkotika Nasional;



11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
16. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
18. Badan Pusat Statistik;
19. Badan SAR Nasional;
20. Badan Standarisasi Nasional;
21. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
22. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
24. Lembaga Ketahanan Nasional;
25. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
26. Lembaga Sandi Negara;
27. Lembaga Administrasi Negara;
28. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

D. Sekretariat Daerah Provinsi

1. Sekretariat Daerah Provinsi Aceh;
2. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
7. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
10. Sekretariat Daerah Provinsi Bangka Belitung;
11. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
14. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
27. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
30. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
31. Sekretariat Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
34. Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.



Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia Seleksi,

Anwar Sanusi

